



**TERENDUS  
PALSUKAN  
PUTUSAN  
SEMUA HAKIM  
KONSTITUSI  
DIPOLISIKAN**

**M**ahkamah Konstitusi (MK) diguncang prahara. Sebanyak 9 hakim konstitusi, 1 panitera dan 1 panitera pengganti dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Laporan itu terkait dugaan pemalsuan surat dalam putusan persidangan perkara terkait pencopotan hakim MK Aswanto. Dugaan mengubah substansi putusan uji materi perkara nomor 103/PUU-XX/2022 terendus dari kalimat pada petikan putusan yang dibacakan hakim di ruang sidang berbeda dengan yang ada di salinan putusan. Sang pengugat, advokat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak menilai semua hakim di MK bisa terjerat Pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun. MK pun langsung membentuk Majelis Kehormatan untuk mengusut dugaan perubahan putusan antara yang diucapkan dan yang ada di salinan.

(Baca Hal 11)

**PUTUSAN MK NOMOR 103  
YANG DIDUGA BERUBAH YAITU:**

**YANG DIUCAPKAN DI SIDANG PADA 23 NOVEMBER 2022:**

"Dengan demikian, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat 2 UU MK...".

**DAFTAR HAKIM MK DAN  
PANITERA YANG DIPAPORKAN:**

1. Anwar Usman (Hakim Konstitusi)
2. Arief Hidayat (Hakim Konstitusi)
3. Wahiduddin Adams (Hakim Konstitusi)
4. Suhartoyo (Hakim Konstitusi)
5. Manahan M. P. Sitompul (Hakim Konstitusi)
6. Saldi Isra (Hakim Konstitusi)
7. Enny Nurbaningsih (Hakim Konstitusi)
8. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh (Hakim Konstitusi)
9. M. Guntur Hamzah (Hakim Konstitusi)
10. Muhidin (Panitera Perkara No. 103/PUU-XX/2022)
11. Nurlidya Stephanny Hikmah (Panitera Pengganti Perkara No. 103/PUU-XX/2022).

**SALINAN PUTUSAN DI WEBSITE MK:**

"Ke depan, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat 2 UU MK...".

**MAHKAMAH KONSTITUSI**

**Government (Hal.2)**  
**Denny Indrayana**  
Bocorkan Isi  
Pertemuan dengan  
Mahfud MD: Ada  
Skenario  
Perpanjangan  
Presiden

**LAPORAN  
PALSUKAN**

**LAPORAN  
PEMALSUAN**

# Denny Indrayana Bocorkan Isi Pertemuan dengan Mahfud MD: Ada Skenario Perpanjangan Presiden

## SYARAT YANG HARUS DIPENUHI UNTUK MENGAMENDEMEN UUD 1945

Ketentuan mengenai amendemen UUD 1945 tercantum pada Bab XVI UUD 1945 yang terdiri dari Pasal 37 ayat (1) hingga ayat (5). Pasal 37 Ayat (1) menyatakan, usul perubahan UUD dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.

Untuk diketahui, anggota MPR saat ini berjumlah 711 orang, terdiri dari 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan demikian, amendemen UUD dapat diusulkan apabila diajukan oleh 237 orang anggota MPR yang merupakan 1/3 dari total 711 orang anggota MPR.

Menurut Pasal 37 Ayat (2), usul perubahan pasal-pasal UUD itu diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Selanjutnya, MPR akan menggelar sidang untuk mengubah pasal-pasal dalam UUD sebagaimana yang diusulkan. Pasal 37 Ayat (3) mengatur bahwa sidang tersebut harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR atau 474 orang anggota MPR.

Perubahan pasal-pasal UUD itu pun mesti disetujui oleh setidaknya 50 persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR, yakni sedikitnya 356 orang anggota MPR.

"Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat," demikian bunyi Pasal 37 Ayat (4).

Kendati amendemen bukan merupakan hal yang mustahil, Pasal 37 Ayat (5) mengatur bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah. Ketentuan mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tercantum pada Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945.

**JAKARTA** - Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana membocorkan isi pertemuannya dengan Mahfud MD. Salah satunya terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden. Dalam pertemuan itu, Denny mengungkap masih ada pihak yang menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden dengan mengubah konstitusi. Tapi, keinginan itu ditolak mentah-mentah oleh Mahfud MD.

"Memang ada politisi yang tidak perlu saya sebutkan nama dan partainya, menyampaikan kepada Prof. Mahfud bahwa dia dan kelompoknya telah siap untuk mengadakan Sidang Istimewa MPR, sekaligus melakukan perpanjangan ataupun pemilihan Presiden, sehingga tidak diperlukan lagi Pemilu 2024," ucap Denny di PTUN, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Skenarionya, Sidang Istimewa MPR untuk mengubah UUD diadakan saat Presiden Jokowi sedang melakukan kunjungan kenegaraan di luar negeri. "Atas gerakan politik demikian, Prof. Mahfud dengan tegas mengatakan, bahwa perintah dari Presiden Jokowi tetap mengadakan dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024," kata Denny. Mahfud meminta Denny Indrayana dkk untuk melakukan langkah-langkah advokasi agar Pemilu 2024 tidak gagal dilaksanakan, dan yang lebih penting berlangsung secara jujur dan adil.

Sebelumnya, Mahfud kembali menegaskan isu penundaan pemilu sudah gugur karena pemerintah sudah menegaskan Pemilu tetap sesuai jadwal pada 2024. "Saya pastikan, perintah Presiden kepada saya menyiapkan pemilu tahun 2024. Itu perintah Presiden kepada saya melalui rapat, kemudian kepada saya, lebih terbatas, kepada saya, kepada Mendagri kepada Bu Sri Mulyani dan kepala BIN," ucap Mahfud, Selasa (31/1/2023). Untuk diketahui pertemuan Denny dengan Mahfud berlangsung Rabu (25/1/2023).

Menurutnya, Kemendagri sudah menyiapkan agar Pemilu digelar 2024, begitu juga Kemenkeu sudah menggelontorkan anggaran, begitu juga BIN mengendus masalah yang mungkin terjadi.

"Jadi saya katakan, saya jamin, pemilu itu 2024 jadi. Kalau di luar ada itu saya tidak tahu itu urusan politik. Kalau bagi saya itu perintah Presiden," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkum) Mahfud MD menegaskan, isu penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak bersumber dari internal pemerintah.

"Kalau dari pemerintah, jelas. Bahwa kemudian ada pikiran-

pikiran lain, saya katakan itu di luar pemerintah dan itu hak," kata Mahfud saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Penyampaian Arah Kebijakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Tahun Anggaran 2023, Rabu (1/2/2023).

Menurut Mahfud, aspirasi seseorang untuk menunda penyelenggaraan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden tidak bisa dihalangi, karena itu merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum.

"Kita tidak bisa menghalangi kalau seorang ketua partai politik, kelompok masyarakat tertentu, berwacana itu (masa jabatan presiden) harus diperpanjang. Itu kan ya tidak melanggar hukum," papar dia.

Dia menambahkan jika ada gerakan atau gerilya mengenai penundaan pemilu, maka hal itu terkait dengan persoalan di luar ranah politik.

"Masalah yang mungkin harus kita hadapi, situasi di balik layar, bukan soal-soal politik internal yang seperti itu. Misalnya, bencana alam, geopolitik, kejadian luar biasa," jelasnya.

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan Denny kepadanya, lanjut Mahfud, adalah terkait dukungan politik. Denny, kata Mahfud, ketika itu menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan. Denny, kata Mahfud, kemudian meminta persetujuan kepadanya.

Ia pun menegaskan akan menjamin hak Denny untuk memberi dukungan politik kepada Anies tidak dihalangi oleh pihak-pihak tertentu. "Nah, sudah itu pertanyaannya (Denny), kira-kira Anies tuh aman ndak? Itu kan kaitannya kemudian dengan KPK. Nah

di situlah kemudian masuk soal KPK dan partai," kata Mahfud. "Tidak pernah ada saya mengatakan, saya melapor ke Presiden, ndak.KPK juga ndak minta saya melaporkan, (atau) tanyakan ke Presiden kalau ini ditangkap atau enggak. Ndak," tegas Mahfud.

### MPR Meradang

Terpisah, Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani meminta eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana untuk buka-bukaan soal kelompok yang diduga masih menginginkan perpanjangan masa jabatan Presiden lewat sidang Istimewa MPR.

Arsul meminta Denny agar tidak melempar isu yang justru hanya memicu kegaduhan.

"Nah kalau ada kelompok tersebut ya tunjuk dong batang hidungnya siapa mereka-mereka ini. Jangan lempar batu biar ada kegaduhan aja," ucap Arsul, Rabu (1/2/2023).

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP itu menegaskan bahwa pihaknya selama ini tidak pernah berencana untuk menggelar sidang Istimewa MPR. Apalagi sidang dimaksudkan untuk mengamandemen UUD dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

Arsul menyebut semua fraksi di DPR saat ini sedang fokus menyelesaikan proses tahapan Pemilu. Dan delapan dari sembilan fraksi menginginkan agar pemilu dilakukan dengan proporsional terbuka. "Cuma beda satu fraksi yang maunya Pemilu dengan perubahan sistem menjadi proporsional tertutup dan delapan fraksi lainnya tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka," kata Arsul. (wid,tri,rls/dya)



Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) dan Denny Indrayana saat pertemuan pekan lalu membahas mengenai isu politik dan dukungan capres. (Foto-dok)

# Indeks Persepsi Korupsi RI Terburuk Sejak Reformasi Presiden Jokowi dan DPR Dituding Lemahkan KPK



(Ilustrasi) Saat Sejumlah aktivis ICW bersama gerakan #BersihkanIndonesia melakukan aksi unjuk rasa di Gedung KPK, Jakarta. (Foto-dok)

**JAKARTA** - Transparency Internasional merilis hasil Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) RI tahun pengukuran 2022. Berdasarkan hasil pengukuran IPK Indonesia tahun 2022 turun drastis, bahkan terburuk sejak era reformasi. Indonesia meraih skor 34/100 atau turun empat poin dari tahun 2021 dengan skor 38/100.

Indonesia Corruption Watch (ICW) langsung menyoroti korupsi politik yang mengakibatkan IPK Indonesia terpuruk. "Pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini gencar memberantas korupsi politik justru dilemahkan oleh Presiden Joko Widodo melalui perubahan Undang-Undang (UU) KPK," ucap peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/2/2023).

"Tidak cukup itu, Presiden juga membiarkan figur-figur bermasalah memimpin lembaga antirasuah. Sekalipun ada yang ditindak, misal, Juliari P Batubara dan Edhy Prabowo, namun penuntasan perkara itu masih menemui jalan buntu. Sehingga wajar saja jika responden yang terlibat dalam pengumpulan data untuk penilaian IPK menaruh rasa pesimis terhadap pembenahan sektor politik."

Kedua, sambung Kurnia, ICW mencermati sikap pemerintah melalui menteri-menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju yang cenderung permisif terhadap kejahatan korupsi. Sebagai contoh, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan disebutkan sempat berulang kali mengomentari mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan kalimat destruktif.

"Momen lain diperlihatkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang mana beberapa waktu lalu, dalam kutipan sejumlah pemberitaan,

meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak menindak kepala daerah, melainkan fokus pada pendampingan," kata Kurnia.

"Pernyataan-pernyataan semacam ini tentu menunjukkan sikap yang berseberangan dengan harapan atas perbaikan pemberantasan korupsi."

Kemudian yang ketiga, regulasi yang sejatinya merupakan produk politik antara presiden dan DPR tidak kunjung mendukung penguatan pemberantasan korupsi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir saja, undang-undang yang diundangkan tak lebih dari sekadar upaya untuk semakin mendegradasi upaya pemberantasan korupsi.

"Mulai dari KUHP, UU Pemasarakatan, UU Cipta Kerja, UU Mahkamah Konstitusi (MK), dan UU Minerba. Segala yang diucapkan oleh pembentuk UU berkaitan dengan pemberantasan korupsi terbukti hanya ilusi, tanpa ada langkah konkret," ujar Kurnia.

"Begitu pula Presiden, janji politik saat kampanye tahun 2014 maupun 2019 dilupakan begitu saja seiring dengan menguatnya lingkaran kepentingan politik."

Lalu keempat, pemerintah dan DPR terbilang gagal menciptakan kepastian hukum untuk menjamin gelaran pesta demokrasi yang mengedepankan nilai-nilai integritas. Sebagaimana diketahui, pada dasarnya UU Pemilu dan UU Pilkada masih memperbolehkan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai kepala daerah maupun anggota legislatif.

Eks penyidik senior KPK Novel Baswedan menilai revisi UU KPK pada 2019 berbuah turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di tahun 2022. Novel mengatakan saat dirinya masih menjadi pegawai KPK pada tahun 2019, IPK RI berada di

angka 40. Namun IPK RI pada 2022 tidak semakin membaik justru melorot drastis turun poin dari tahun sebelumnya di angka 34.

"Faktor terbesar IPK Indonesia terjun bebas (tahun 2019 -40, sekarang 2022 -34)," kata Novel dalam akun Twitternya, @nazaqistsha, Rabu 1 Februari.

Novel juga mengungkit sejumlah pemimpin dan eks petinggi KPK terbelit pelanggaran etik menjadi faktor lain IPK RI 2022 anjlok. Salah satunya yang masih segar dalam ingatan, eks pimpinan KPK Lili Pintauli diduga menerima gratifikasi berbentuk akomodasi hotel hingga tiket menonton MotoGP Mandalika gelaran tahun 2022.

Dia meminta anggota DPR pendukung kebijakan Ketua KPK Firlil Bahuri selama ini, tidak bungkam dengan skor IPK RI pada 2022 yang semakin turun dari tahun 2019. "Itupun masih tertolong karena tahun lalu pemerintah membuat kebijakan kemudahan berbisnis. Kalo sudah begini kemana tuh anggota legislatif pendukung Firlil cs?" tanya Novel.

## KPK Klaim Sudah Bekerja

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan mengaku prihatin atas menurunnya IPK Indonesia tahun 2022. Oleh karenanya kata Pahala, KPK mendorong penguatan komitmen dan terobosan dalam pemberantasan korupsi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Hasil ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dicarikan solusi jika tidak ingin keadaannya semakin buruk. Kita harus melakukan terobosan antar-seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah," kata Pahala melalui keterangan resminya, Rabu (1/2/2023).

Pahala mengklaim, KPK telah

menerapkan berbagai cara untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Salah satunya, trisula strategi pemberantasan korupsi melalui pendekatan strategi pendidikan, pencegahan, dan penindakan. "Di mana ketiga strategi tersebut dikolaborasi bersama para pemangku kepentingan dan dukungan seluruh elemen masyarakat," ujarnya.

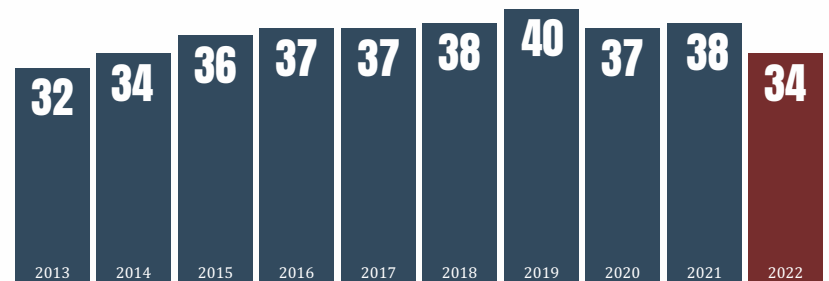
Pertama dibebankan Pahala, yakni strategi pendidikan yang bertujuan membentuk warga negara untuk berintegritas dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Dalam implementasinya, KPK melibatkan Kementerian dan lembaga terkait, serta pemereri. "KPK juga berkolaborasi dengan berbagai kelompok masyarakat untuk memperluas jangkauan sosialisasi, kampanye, dan penguatan antikorupsi. Di antaranya melalui program desa antikorupsi, politik cerdas berintegritas, dan penyuluh antikorupsi," jelasnya.

Strategi kedua yakni pencegahan. Di mana, KPK melakukan kajian untuk memetakan titik-titik risiko korupsi di seluruh lembaga publik. Kemudian memberikan saran perbaikan dan pendampingan guna mendorong perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan terhindar dari praktik-praktik korupsi. "KPK juga memanfaatkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pelaporan gratifikasi sebagai instrumen pencegahan korupsi," sambungnya.

Sementara strategi ketiga yakni dilakukan lewat penindakan. Di mana, kata Pahala, KPK telah melaksanakan tugas penegakkan hukum tindak pidana korupsi melalui fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. "Tugas tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi sekaligus optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara melalui asset recovery," tutupnya. (wid,rls,ist,kum/dya)

## INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA (2013-2022)

Sumber: pengukuran Transparency Internasional



# Inflasi Gabungan 8 Kota di Jatim Tembus 6,41 Persen



Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan saat paparan Berita Resmi Statistik (BRS), Rabu (1/2/2023). (Ist)

**SURABAYA** - Inflasi year on year (yoy) gabungan delapan kota di Jawa Timur pada Januari 2023 sebesar 6,41 persen. Sementara tingkat inflasi month to month (mtm) gabungan 8 kota di Jawa Timur Januari 2023 sebesar 0,36 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,66.

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Dadang Hardiwan, mengatakan bahwa pada level kota, inflasi yoy Januari 2023 tertinggi terjadi di Jember sebesar 7,08 persen dengan IHK sebesar 115,84. "Kemudian terendah terjadi di Probolinggo sebesar 5,21 persen dengan IHK sebesar 112,43," ujar Dadang, Rabu (1/2/2023).

Dadang pun menerangkan, tingkat inflasi secara yoy pada Januari 2023 untuk komponen energi tercatat sebesar 16,88 persen, dan secara mtm mengalami deflasi sebesar 0,92 persen. "Tingkat inflasi yoy Januari 2023 untuk komponen bahan makanan sebesar 5,97 persen, dengan tingkat inflasi mtm sebesar 0,75 persen," kata Dadang.

Dadang mengatakan inflasi yoy terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,51 persen. Kemudian kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,23 persen.

Ada juga kelompok perumahan air,

listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,02 persen. Selain itu, kelompok perlengkan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 5,22 persen. Kelompok kesehatan sebesar 4,73 persen, kelompok transportasi sebesar 14,94 persen. Kemudian kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,39 persen.

"Kelompok pendidikan sebesar 4,97 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 9,59 persen, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,40 persen.

Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,06 persen," kata Dadang.

Adapun sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi Jatim pada Januari 2023 (mtm) yakni cabai rawit yang mengalami kenaikan harga hingga 28,30 persen, disusul cabai merah naik 16,29 persen, tarif air minum PAM 9,25 persen, tarif kereta api 5,91 persen, beras 2,89 persen, emas perhiasan 2,82 persen, rokok kretek filter 1,86 persen, tukang bukan mandor 1,35 persen, sewa rumah 1,09 persen dan kontrak rumah 0,48 persen.

Sementara sejumlah komoditas yang telah menahan laju inflasi atau disebut deflasi di antaranya adalah tomat yang mengalami penurunan harga -18,42 persen, sawi hijau -12,49 persen, angkutan udara -9,41 persen,

terlur ayam ras -6,31 persen, semangka -9 persen, kangkung -4,72 persen, sepatu pria -3,41 persen, daging ayam ras -2,89 persen dan bensin -1,67 persen.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia - Jatim, Budi Hanoto mengatakan BI bersama dengan Pemprov Jatim dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) masih akan menggunakan kerangka strategi 4K untuk menjaga tingkat inflasi tahun ini.

"Strategi 4K itu adalah keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif," katanya.

Strategi keterjangkauan harga dilakukan dengan pemantauan harian harga komoditas pangan strategis di 116 pasar rakyat melalui Siskaperbaso (Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok), operasi pasar komoditas pangan strategis secara targeted, dan perluasan serta penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang diutamakan untuk intra Jatim.

Menjaga ketersediaan pasokan dilakukan penguatan sisi hulu seperti percepatan gerakan tanam padi dan komoditas hortikultura, program Pekarangan Pangan Lestari (PEKAPARI-P2L), pengembangan klaster pangan, pemberian bantuan pupuk organik serta program digital farming dan optimalisasi teknologi penyimpanan.

"Sedangkan untuk kelancaran distribusi diberikan dukungan transportasi dari Pemprov Jatim berupa penambahan koridor angkutan bus TransJatim, penguatan koordinasi pengamanan stok BBM dan LPG 3kg, serta pelaksanaan sidak dan inspeksi," imbuh Budi.

Sementara itu, komoditas cabai rawit memberikan sumbangan inflasi terbesar di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada Januari 2023, sehingga laju inflasi di kabupaten setempat sebesar 0,16 persen.

"Pada Januari 2023 terjadi inflasi month to month (mtm) sebesar 0,16 persen dengan Indeks harga konsumen (IHK) sebesar 115,84 persen," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jember Tri Erwandi saat konferensi pers di Kantor BPS Jember, Rabu (1/2/2023).

Menurutnya, inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran di antaranya kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,66 persen yang merupakan tertinggi dibandingkan kelompok lainnya.

"Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi mtm bulan Januari 2023 adalah cabai rawit, beras, rokok kretek filter, tarif kereta api dan minyak goreng. Sedangkan komoditas yang menyumbang deflasi

pada Januari 2023 yakni bensin, daging ayam ras, telur ayam ras, tomat dan ayam hidup," tuturnya.

Inflasi bulanan (mtm) di Jember pada Januari 2023 sama dengan inflasi year to date (ytd) sebesar 0,16 persen, sedangkan year on year (yoy) sebesar 7,08 persen.

Sementara Kepala Disperindag Jember Bambang Saputro yang juga hadir dalam konferensi pers itu mengatakan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional relatif stabil karena pihaknya telah melakukan operasi pasar secara bertahap di beberapa pasar tradisional Jember.

"Mudah-mudahan laju inflasi di Jember dapat dikendalikan karena kami juga melakukan operasi pasar untuk beberapa bahan pokok penting di pasar tradisional hingga Maret 2023," katanya.

Terpisah, kenaikan harga beras mempengaruhi terjadinya inflasi pada Januari 2023 di Kota Madiun, sebesar 0,35 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113. "Pada Januari 2023 Kota Madiun mengalami inflasi sebesar 0,35 persen. Angka itu tertinggi ketiga di Provinsi Jawa Timur," ujar Kepala BPS Kota Madiun Dwi Yuhenny dalam keterangannya di Madiun, Rabu (1/2/2023).

Menurut dia, inflasi di Kota Madiun di awal Januari ini cukup terkendali. Hal itu tidak lepas dari peran serta tim pengendali inflasi daerah (TIPD) dalam melakukan berbagai intervensi untuk menekan laju inflasi.

"Inflasi Kota Madiun pada Januari 2023 ini terendah dibandingkan periode yang sama dua tahun sebelumnya. Yaitu di Januari tahun 2022 sebesar 0,44 persen dan Januari 2021 sebesar 0,60 persen," katanya.

Selain beras, terdapat beberapa komoditas penyumbang inflasi lainnya, di antaranya kenaikan harga cabai rawit, rokok kretek filter, minyak goreng dan bawang merah. Kemudian tarif kereta api, cabai merah, rokok kretek serta naiknya harga emas perhiasan.

Sedangkan penekan inflasi di antaranya menurunnya harga komoditas telur ayam ras, bensin, daging ayam ras, serta tarif kendaraan roda empat daring.

"Berdasarkan kelompok pengeluaran di Januari tahun ini, inflasi tertinggi terjadi di kelompok makanan, minuman dan tembakau," kata dia.

Adapun pada Januari 2023, dari delapan kota dan kabupaten penghitung inflasi di Jawa Timur, seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sumenep sebesar 0,63 persen, Surabaya 0,42 persen dan Madiun 0,35 persen. Kemudian Banyuwangi 0,27 persen, Kediri 0,26 persen, Probolinggo 0,22 persen, Jember 0,16 persen dan inflasi terendah Malang 0,15 persen. (ant/lut/dya)

“  
Strategi 4K itu adalah keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,”

**BUDI HANOTO**  
Kepala Kantor Perwakilan  
Bank Indonesia - Jatim

# Ketua DPRD Jatim Kembali Diperiksa KPK Bersama Sejumlah Ketua Fraksi



(Ilustrasi) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terkait dugaan suap pengelolaan dana hibah DPRD Jatim, Rabu (1/2/2023). (Ist)

**SURABAYA** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terkait dugaan suap pengelolaan dana hibah DPRD Jatim, Rabu (1/2/2023). Pemeriksaan dilakukan di Mako Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jawa Timur, Jalan Gresik Nomor 39, Morokrengan, Krebangan, Kota Surabaya.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan pemeriksaan ini masih terkait dengan tersangka STPS (Sahat Tua P Simandjuntak) yang merupakan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur.

Dari 10 nama saksi yang diperiksa, nama Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi kembali menjalani pemeriksaan meskipun sebelumnya telah diperiksa di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim.

Kemudian anggota DPRD Jatim lainnya yang diperiksa KPK adalah Suyatni Priasmoro, Heri Romadhon, Achmad Sillahuddin, dan Blegur Prijanggono. Kemudian Sri Untari, Fauzan Fu'adi, Muhammad Fawait, dan Muhamad Reno Zulkarnaen. Selain itu, KPK juga memeriksa pegawai Bank BNI Cabang HR Muhammad Surabaya Maudy Farah Fauzi.

Terkait Kusnadi yang sebelumnya telah menjalani pemeriksaan, Ali tidak menjelaskan alasan KPK kembali memeriksa politisi PDIP tersebut. "Semua diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi," ujarnya.

Sebelumnya, KPK sudah memanggil Ketua DPRD Jatim Kusnadi untuk diperiksa sebagai saksi kasus

dugaan suap alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Kusnadi menjalani pemeriksaan di Kantor BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur, Rabu (25/1/2023).

Saat itu, selain Kusnadi, penyidik juga memanggil tiga Wakil Ketua DPRD Jatim. Mereka adalah Anik Maslachah, Achmad Iskandar, dan Anwar Sadad. Sekretaris DPRD Jatim Andik Fadjar Tjahjono juga dipanggil penyidik.

Selain jajaran anggota dewan, KPK juga memanggil sejumlah pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Jatim. Mereka adalah Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) dan Bina Marga Jatim Edy Tambeng Widjaja; Kadis Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Baju Trihaksoro; dan kadis PU Sumber Daya Air Muhammad Isa Anshori.

Saksi-saksi lain yang juga dipanggil adalah PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang bernama Rudi; Kepala Desa Robatal bernama Hodari. Kemudian, tiga Staf Bidang Rendalev Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim bernama Angga Ariqunt N, Arief Rachman Hakim, Moh. Huda Prabawa, dan Nining Lustari. Atasan mereka, Kepala Bidang (Kabid) Randalev, Ikmal Putra juga dipanggil. Selanjutnya, KPK juga memanggil Moh. Holil Affandi dari pihak swasta. Dengan demikian, jumlah keseluruhan saksi yang dipanggil hari ini sebanyak 16 orang.

Sebagai informasi, dalam perkara ini KPK telah menggeledah sejumlah lokasi di Jawa Timur. Penyidik menggeledah kantor pimpinan DPRD Jatim dan semua fraksi di gedung wakil rakyat itu. Selang beberapa waktu kemudian, KPK juga menggeledah kantor Gubernur Jatim, Khoifah Indar Parawansa dan wakilnya, Emil Elestianto Dardak.

Kemudian, kantor Sekretariat Daerah Jatim juga digeledah. KPK juga menggeledah sejumlah rumah pimpinan DPRD Jatim seperti, kediaman Ketua Komisi D DPRD Jatim dan Koordinator Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim. Kedua lokasi itu digeledah penyidik pada Kamis (19/1/2023).

Kemudian, pada Selasa (17/1/2023) dan Rabu (18/1/2023)

penyidik juga menggeledah empat lokasi lain. Tempat tersebut adalah rumah kediaman Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim yang beralamat di Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim yang beralamat di Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Kemudian, kediaman anggota DPRD Provinsi Jatim yang beralamat di Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur serta rumah Kepala Bappeda Jatim, Mohammad Yasin. KPK menyatakan akan menganalisis sejumlah barang bukti yang ditemukan untuk kemudian dilakukan penyitaan. "Analisis dan penyitaan akan segera dilakukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan tersangka Sahat Tua P. Simandjuntak," tutur Ali.

Diketahui KPK menetapkan Sahat Tua P Simandjuntak Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 sebagai tersangka penerima uang suap pengelolaan dana hibah. Selain itu, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus korupsi yang sama.

Yaitu, Rusdi Staf Ahli Sahat Tua, Abdul Hamid Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang sekaligus Koordinator Kelompok Masyarakat, dan Ilham Wahyudi Koordinator Lapangan Kelompok Masyarakat.

Sahat Tua selaku Pimpinan DPRD Jatim sudah menerima uang suap sebanyak Rp5 miliar atas perannya memperlancar pengurusan pemberian dana hibah ke desa-desa. KPK mensinyalir ada kesepakatan antara Sahat Tua dengan Abdul Hamid. Sesudah pembayaran komitmen fee ijon, Sahat Tua meminta bagian 20 persen dari nilai penyaluran dana hibah. Sedangkan Abdul Hamid mengambil 10 persen.

Atas sangkaan penerima suap, Sahat Tua Simandjuntak dan Rusdi terancam jerat Pasal 12 huruf b, atau Pasal 11 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Abdul Hamid Kepala Desa Jelgung, dan Ilham Wahyudi Koordinator Lapangan Kelompok Masyarakat sebagai tersangka penyuaap terancam jerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, atau Pasal 13 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ant/lut/dya)

“

Analisis dan penyitaan akan segera dilakukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan tersangka Sahat Tua P. Simandjuntak,”

ALI FIKRI  
Plt Juru Bicara KPK

A portrait of Mikha Tambayong, a young woman with dark hair styled in a bun, wearing a grey lace dress. She is looking slightly to the right of the camera with a soft smile. The background is a warm, blurred indoor setting.

# MIKHA TAMBAYONG

Ganti Nama Setelah Jadi  
Istri Deva Mahendra

*Foto - Foto : Instagram/miktambayong*



ditawari untuk bermain dalam sinetron Nada Cinta sebagai pemeran utama.

Tak berhenti sampai disitu, keponakan dari Harvey Malaihollo ini juga sempat bermain dalam sebuah film layar lebar sebagai pemeran utama.

Film tersebut berjudul Fallin' in Love, perempuan yang menganut agama Kristen ini harus beradu akting dengan Adly Fairuz dan juga Boy William.

Sedikitnya sudah ada 15 film yang dibintangi oleh Mikha selama berkarir di dunia hiburan Tanah Air.

Ia bahkan sempat bermain dalam teater musikal berjudul Anugerah Terindah sebagai Bianca.

Pada Sabtu, 28 Januari 2023 lalu, Mikha diketahui resmi menikah dengan Deva Mahendra.

Kabar bahagia keduanya pun lantas langsung mengejutkan hingga menghebohkan publik sekaligus para penggemarnya di media sosial.

Mikha Tambayong dan Deva Mahendra tidak pernah sedikit pun memberikan tanda-tanda bahwa akan ada pernikahan dalam waktu dekat ini.

Mereka juga tidak pernah sesumbar bakal segera menikah di awal tahun 2023 ini.

Namun faktanya justru berbeda, Mikha Tambayong dan Deva Mahendra justru secara tiba-tiba mengabarkan pernikahan yang sudah digelar di The

Ritzcarlton Bali melalui akun Instagram pribadinya masing-masing.

Banyak yang penasaran soal siapakah yang akhirnya memilih untuk berpindah keyakinan beragama, lantaran Deva diketahui merupakan seorang muslim.

Namun, tak sedikit yang beranggapan bahwa Mikha dan Deva sama-sama mempertahankan agamanya masing-masing. Alias, tak ada yang pindah dari agama masing-masing, meskipun telah menikah.

Sebelum akhirnya menikah dengan Deva Mahendra, Mikha diketahui sempat dekat bahkan berpacaran dengan beberapa pria.

Sebut saja Raffi Ahmad, Chicco Jerikho, Ajun Perwira, Fero Walandouw, El Rumi, hingga Daniel Wenas.

Terbaru, Mikha Tambayong sudah resmi mengganti nama akun Instagram pribadinya dari yang sebelumnya hanya Mikha Tambayong kini menjadi Mikha Tambayong Mahendra.

Setelah dirinya resmi dinikahi oleh sang pujaan hati Deva Mahendra, Mikha pun kini telah mengubah namanya tersebut.

Melalui bio Instagram pribadinya, pemilik nama lengkap Maudy Mikha Maria Tambayong ini pun terlihat menambahkan nama belakang sang suami yakni Mahendra di belakang namanya tersebut (berbagai sumber)

**BANYAK** publik yang ingin mengetahui biodata Mikha Tambayong, apalagi setelah ia menikah dengan aktor deva Mahendra.

Masyarakat medsos atau netizen penasaran dengan agama yang dianut oleh Mikha saat ini. Termasuk, apakah Mikha mengikuti agama yang dianut oleh suaminya atau tidak.

Mikha Tambayong merupakan anak tunggal dari pasangan Michael Tambayong dan Deva Tambayong.

Lahir pada 15 September 1994, kini Mikha Tambayong memasuki usia 28 tahun.

Lahir dengan nama lengkap Maudy Mikha Maria Tambayong, ia diketahui merupakan keturunan Minahasa dan Ambon. Karirnya dimulai lewat ajang pemilihan gadis sampul pada 2008

silam.

Usai tampil sebagai finalis Gadis Sampul 2008, nama Mikha Tambayong pertama kali dikenal luas usai berperan sebagai Tasya di sinetron Kepompong.

Ia bahkan ditawarkan untuk mengisi soundtrack sinetron tersebut dengan membawakan lagu berjudul Cinta Pertama.

Pada 2010 ia sempat merilis album studio berjudul Bekas Pacar. Lagu tersebut juga merupakan soundtrack dari sinetron Kapten Kompleks yang ia perankan.

Di awal karirnya, Mikha Tambayong diketahui sempat vakum untuk beberapa waktu demi menyelesaikan pendidikannya. Setelah comeback, ia langsung





# MASYARAKAT JANGAN ENGGAN PERIKSA AWAL KANKER SERVIKS

**KEMENTERIAN** Kesehatan kembali mengingatkan masyarakat jangan enggan untuk memeriksakan atau melakukan deteksi dini kanker serviks demi menekan angka kematian akibat penyakit yang sebagian besar diderita oleh kaum perempuan itu.

"Kalau di Indonesia, kanker serviks ini menempati urutan ke-2. Ke-2 banyaknya, ke-2 tingkat kasus dan kematiannya. Kenapa banyak banget? Selain karena faktor risiko yang menyebabkan kanker serviks, dua adalah program deteksi dini di Indonesia itu belum berjalan optimal. Jadi ketemunya selalu stadium lanjut, akhirnya tingkat kematiannya tinggi," kata Ahli Madya Epidemiologi Kemenkes dr. Sylviana Andiniasari, M.Sc di Jakarta.

Menurut data Global Cancer Observatory 2020, kanker payudara memiliki jumlah kasus baru tertinggi di Indonesia sebesar 65.858 kasus atau 16,6 persen dari total 396.914 kasus kanker. Kanker serviks (leher rahim) menempati urutan kedua dengan jumlah 36.633 kasus atau 9,2 persen dari total kasus kanker. Dengan kasus kematian 21.003 akibat serviks.

"Jadi pemerintah itu sudah mengadakan program deteksi dini. Tapi mau disokong kayak gimana pun, kalau nggak ada orang yang mau diperiksa ya susah," kata Sylviana.

Lebih lanjut, Sylvia juga mengungkapkan bahwa alasan para wanita enggan melakukan deteksi dini

kanker serviks adalah karena merasa malu dan takut mengetahui hasil pemeriksaannya.

"Yang terbanyak selama ini kalau kita survei kenapa nggak mau periksa, satu karena malu, dua nggak pengen tahu hasilnya apa. Karena takut," jelasnya.

Sementara itu, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi dr. Boy Abidin, Sp.OG(K) mengungkapkan bahwa deteksi dini sangat perlu dilakukan bahkan meskipun tidak merasakan keluhan apa pun. Sebab jika sudah timbul keluhan, menurut Boy, hal tersebut sudah masuk ke gejala stadium kanker.

"Yang menarik, proses perubahan ini terjadinya tidak mendadak. Yang sering kali kita temukan, pasien datang sudah dengan stadium 2 bahkan sudah stadium 4. Maka itu pentingnya deteksi dini," terang Boy.

Kalau sudah ada keluhan pendarahan se usai senggama, keputihan yang berulang, dan kadang disertai darah hingga bau, dan nyeri panggul, sudah ada gejala-gejala cancer pada umumnya, itu bisa dibilang terlambat deteksinya.

Boy mengatakan, wanita yang wajib melakukan pemeriksaan dini kanker serviks bukan hanya yang sudah menikah saja. Namun, mereka yang sudah melakukan aktivitas seksual perlu melakukan pemeriksaan dini. Terlebih bagi mereka yang melakukan hal tersebut di bawah usia

20 tahun.

"Kalau kanker serviks semudamudanya ya yang sudah berhubungan seksual itu perlu dideteksi dini. Sampai 65 tahun itu perlu deteksi. Karena usia harapan hidup dianggap di bawah 70," papar Boy.

Bagi yang sudah melakukan hubungan seksual di bawah usia 20 tahun perlu lakukan deteksi dini karena sel-selnya masih rentan. "Begitu ada virus HPV masuk, terjadilah kerusakan itu," kata Boy.

Deteksi dini juga sangat penting untuk dilakukan karena proses perjalanan virus yang mengakibatkan kanker serviks baru muncul setelah 5 hingga 20 tahun. Sebelum terlambat, para wanita pun perlu melakukan deteksi dini dan melakukannya secara berulang 5 tahun sekali.

"Mulai dari stadium normal kemudian pre-cancer lalu masuk ke stadium cancer ini ada proses perjalanan 5 sampai 20 tahun. Jadi virus itu masuknya mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu. Dia nggak ada keluhan apa-apa. Karena tidak deteksi dini, kemudian dia sudah masuk stadium pre-cancer. Jadi masuknya virus itu tidak serta merta langsung jadi kanker," jelas Boy.

"Para single parent yang sudah tidak melakukan aktivitas suami istri juga tetap. Kalau sudah pernah melakukan aktivitas suami istri, ada kemungkinan virus itu masuk. Jadi harus deteksi," tutupnya (Ant)



**Mulai dari stadium normal kemudian pre-cancer lalu masuk ke stadium cancer ini ada proses perjalanan 5 sampai 20 tahun. Jadi virus itu masuknya mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu. Dia nggak ada keluhan apa-apa. Karena tidak deteksi dini, kemudian dia sudah masuk stadium pre-cancer. Jadi masuknya virus itu tidak serta merta langsung jadi kanker,"**

**dr. Boy Abidin, Sp.OG(K)  
Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi**





# JIKA GAJAH PUNAH, TINGKAT KARBON DI ATMOSFER AKAN TINGGI

**PENELITI** dunia hewan dan rekannya dari Universitas Saint Louis melaporkan bahwa gajah memainkan peran kunci dalam menciptakan hutan yang menyimpan lebih banyak karbon di atmosfer dan menjaga keanekaragaman hayati hutan di Afrika.

Jika gajah sudah terancam punah, maka hutan hujan Afrika tengah dan barat yang merupakan hutan hujan terbesar kedua di dunia, akan kehilangan antara enam dan sembilan persen kemampuannya untuk menangkap karbon di atmosfer. Jika hal ini terjadi, secara otomatis akan memperbesar pemanasan planet.

Temuan tersebut telah dipublikasikan di jurnal Proceedings of the Nation Academy of Sciences (PNAS) pada 23 Januari 2023 dengan judul makalah "Megaherbivores modify forest structure and increase carbon stocks through multiple pathways."

Asisten profesor biologi di Universitas Saint Louis dan penulis senior makalah Stephen Blake, telah menghabiskan sebagian besar karirnya untuk mempelajari gajah.

Dalam makalah saat ini, Blake, penulis utama Fabio Berzaghi dari Laboratory of Climate and Environmental Sciences (LSECE), Francis, dan rekannya mendokumentasikan dengan tepat bagaimana ekologi megaherbivora memiliki pengaruh yang begitu kuat terhadap retensi karbon di hutan hujan Afrika.

"Gajah telah diburu oleh manusia selama ribuan tahun," kata Blake.

Akibatnya, gajah hutan Afrika sangat terancam punah. Argumen bahwa semua orang mencintai gajah belum memberikan dukungan yang cukup untuk menghentikan pembunuhan.

Mengalihkan argumen untuk konservasi gajah ke arah peran yang dimainkan gajah hutan dalam menjaga keanekaragaman hayati hutan, yang kehilangan gajah berarti kehilangan

keanekaragaman hayati hutan, juga tidak berhasil, karena jumlahnya terus menurun.

Sekarang kita dapat menambahkan kesimpulan kuat bahwa jika kita kehilangan gajah hutan, kita akan melakukan tindakan merugikan global terhadap mitigasi perubahan iklim.

Blake menegaskan, "Pentingnya hutan gajah untuk mitigasi iklim harus dianggap serius oleh pembuat kebijakan untuk menghasilkan dukungan yang dibutuhkan untuk konservasi gajah. Peran gajah hutan di lingkungan global kita terlalu penting untuk diabaikan."

Di dalam hutan, beberapa pohon memiliki kayu ringan (pohon dengan kerapatan karbon rendah) sementara yang lain menghasilkan kayu berat (pohon dengan kerapatan karbon tinggi).

Pohon dengan kepadatan karbon rendah tumbuh dengan cepat, menjulang di atas tanaman dan pohon lain untuk mendapatkan sinar matahari.

Sementara itu, pohon dengan kerapatan karbon tinggi tumbuh lambat, membutuhkan lebih sedikit sinar matahari dan mampu tumbuh di tempat teduh.

Gajah dan megaherbivora lainnya memengaruhi kelimpahan pohon-pohon ini dengan memakan lebih banyak pohon-pohon dengan kepadatan rendah karbon, yang lebih enak dan bergizi daripada spesies dengan kepadatan karbon tinggi. (National Geographic)



Pentingnya hutan gajah untuk mitigasi iklim harus dianggap serius oleh pembuat kebijakan untuk menghasilkan dukungan yang dibutuhkan untuk konservasi gajah. Peran gajah hutan di lingkungan global kita terlalu penting untuk diabaikan."

**STEPHEN BLAKE**  
Asisten profesor biologi di Universitas Saint Louis & penulis senior makalah



# ANAK KORBAN PENCULIKAN RAWAN ALAMI TRAUMA

**PSIKOLOG** anak dan remaja dari Universitas Indonesia Vera Itabiliana Hadiwidjojo mengatakan, anak korban penculikan sangat rawan mengalami trauma, mengingat peristiwa tersebut merupakan pengalaman yang dapat mengancam keselamatan jiwanya.

"Bisa saja anak mengalami trauma karena penculikan merupakan pengalaman yang membawa perubahan drastis dalam hidup anak dan bisa mengancam jiwanya," kata Vera.

Menurutnya, saat menjadi korban penculikan, anak tentu akan merasa takut, cemas tidak bisa kembali kepada orangtuanya, dan bingung dengan apa yang dapat ia lakukan untuk menyelamatkan diri.

Untuk itu, Vera mengatakan, ketika anak korban penculikan kembali kepada orangtuanya, maka ia seharusnya diperiksa secara menyeluruh untuk mengetahui pendampingan apa saja yang perlu dilakukan.

"Yang jelas anak butuh pendampingan untuk menghilangkan rasa takut dan mengembalikan kepercayaan pada lingkungan agar

dia dapat kembali ke rutinitasnya sebagai anak," ujarnya.

Senada dengan Vera, psikolog dari Universitas Indonesia sekaligus parenting coach Irma Gustiana mengatakan anak korban penculikan akan merasakan trauma yang membuat dia merasa cemas dan tidak aman, sehingga dapat mengganggu kegiatan sehari-harinya baik di sekolah, di rumah, maupun di tempatlainnya.

"Trauma itu bisa terlihat secara langsung atau bisa menjadi respon tunda. Jadi kalau secara langsung itu bisa kita lihat dia menangis, terus kelihatan wajahnya ketakutan, kemudian dia bengong, dan terlihat bingung. Itu adalah bentuk manifestasi dari trauma akibat pengalaman penculikan tadi," imbuh Irma.

Ia kemudian memberi saran bahwa ketika anak kembali bertemu orangtuanya pasca penculikan, hal pertama harus dilakukan orangtua adalah mengecek kondisi fisik anak untuk memastikan apakah ada luka atau tanda-tanda lain yang mencurigakan.

Kemudian, ia melanjutkan, penuhi

kebutuhan makanan dan minuman anak, serta hindari bertanya mengenai peristiwa penculikan atau bahkan menyalahkan anak.

"Hindari menanyakan kejadiannya seperti apa atau menyalahkan anak. Itu akan menjadi trigger dan membuat anak menjadi merasa bersalah atau semakin ketakutan," katanya.

## Lemah pengawasan

Irma Gustiana mengingatkan pentingnya meningkatkan pengawasan orangtua untuk mencegah penculikan anak, sebab keamanan dan keselamatan anak merupakan tanggungjawab orangtua.

Beberapa aksi penculikan belakangan didasari oleh maraknya penjualan organ tubuh demi mendapatkan uang. Menurutnya, lemahnya pengawasan orangtua dapat menjadi salah satu faktor yang memudahkan penculik untuk melakukan kejahatan tersebut, mengingat anak merupakan kelompok paling rentan yang belum bisa melindungi dirinya sendiri.

Selain memberikan pengawasan, Irma mengatakan orangtua juga perlu mengajarkan anak mengenai cara memberikan respons terhadap orang-orang asing yang ada di sekitar mereka.

Kemudian, ajarkan cara menolak ajakan orang lain yang tidak dikenal. Pastikan juga anak mampu menyampaikan isi pikirannya. Hal itu, menurut Irma, dapat dilatih salah satunya dengan bermain roleplay.

Irma juga mengatakan penting bagi orangtua untuk mengenal tetangga di sekitar rumah, sebab menurutnya kasus penculikan juga sangat mungkin terjadi di daerah perumahan. Pastikan juga anak tidak menggunakan aksesoris berlebihan yang mampu mengundang penculik.

Di samping itu, Irma mengatakan mengajari anak bela diri dapat menjadi salah satu alternatif untuk mencegah penculikan. Meski demikian, perlu diingat bahwa anak tetaplah merupakan kelompok yang tidak berdaya, apalagi jika penculikan dilakukan oleh beberapa orang dewasa (Ant)

Bisa saja anak mengalami trauma karena penculikan merupakan pengalaman yang membawa perubahan drastis dalam hidup anak dan bisa mengancam jiwanya,"

**VERA ITABILIANA HADIWIDJOJO**  
Psikolog anak dan remaja dari  
Universitas Indonesia



## Terendus Palsukan .... (dari hal 1)

**ADVOKAT** pengugat perkara Nomor 103/PUU-XX/2022, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak melaporkan 9 hakim konstitusi, 1 panitera dan 1 panitera pengganti ke Polda Metro Jaya. Laporan itu terkait dugaan pemalsuan surat dalam putusan persidangan perkara tersebut.

"Jadi pada hari ini kita baru saja membuat laporan polisi, pada laporan kali ini kita membuat laporan 9 hakim konstitusi dan juga 1 panitera, dan 1 panitera pengganti atas adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dan menggunakan surat palsu sebagai mana salinan putusan dan juga risalah sidang dan juga dibacakan dalam persidangan terkait dengan substansi putusan itu terdapat frasa atau substansi yang sengaja diubah karena bunyinya itu awalnya dengan 'demikian' kemudian 'ke depan'. Ini kan ada suatu hal yang baru apabila ini dinyatakan dalam suatu hal yang typo sangat tidak substansial karena ini substansi frasanya sudah berbeda kurang lebih seperti itu," kata kuasa hukum Zico, Leon Maulana Mirza kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (1/2/2023).

Laporan Zico ke Polda Metro Jaya yang diwakili tim kuasa hukumnya itu terregistrasi dengan nomor LP/B/557/11/2023/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 1 Februari 2023. Dalam laporan tersebut, seluruh hakim MK dilaporkan atas dugaan pemalsuan surat Pasal 263 KUHP.

"Jadi terkait dengan kerugiannya, ketika sudah terbukti telah ada pemalsuan, di situlah kerugiannya. Jadi di sini kita percayakan kepada penegak hukum, tentunya kepolisian untuk mengusut tuntas terkait dengan permasalahan ini. Jadi terkait dengan kerugiannya, kerugian konstitusional karena kita Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan permohonannya Undang-undang Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Leon membawa sejumlah barang bukti dalam laporannya tersebut. Di antaranya KTP kliennya, Zico, surat kuasa hingga salinan putusan perkara Nomor 103/PUU-XX/2022.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) diduga mengubah substansi putusan uji materi perkara nomor 103/PUU-XX/2022. Sebab, kalimat pada petikan putusan yang dibacakan hakim di ruang sidang berbeda dengan yang ada di salinan putusan.

Dilihat, di YouTube dan website Mahkamah Konstitusi, gugatan Zico itu berkaitan dengan pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto yang dilakukan oleh DPR. Aswanto digantikan Guntur Hamzah yang saat itu merupakan Sekjen MK.

## Bentuk MKMK

Mahkamah Konstitusi (MK) buka suara atas tuduhan mengubah substansi putusan uji materi perkara nomor 103/PUU-XX/2022 terkait pencopotan hakim MK Aswanto. Mereka menyatakan masalah tersebut akan ditangani oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

"Kami telah menyepakati bahwa penyelesaian mengenai bagaimana kronologisnya atau kebenaran atas isu yang berkembang itu tidak dilakukan oleh kami sendiri, oleh hakim, tapi akan diselesaikan melalui Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu MKMK," kata hakim konstitusi Enny Nurbaningsih dalam jumpa pers di Gedung I Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (30/1).

Ia menuturkan pihaknya akan segera menandatangani Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang MKMK. Sebab, lanjutnya, MKMK merupakan lembaga baru yang sebelumnya adalah dewan etik MK. "Oleh karenanya, supaya ini lebih fair, independen, kami serahkan ke MKMK untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi begitu intinya," ucap Enny.

Lebih lanjut ia menuturkan, keanggotaan lembaga baru ini nantinya akan terdiri atas tiga orang, yakni satu orang hakim aktif, satu orang tokoh masyarakat yang memahami tentang hukum dan konstitusi, serta satu orang akademisi.

"Jadi pada prinsipnya kami akan segera nanti pada MKMK, ini pasti akan ada SK penunjukan mengenai hal itu untuk segera bekerja secepat mungkin, supaya segala sesuatunya bisa terang benderang," tuturnya.

Ditanya terkait independensi MKMK nantinya karena adanya unsur hakim aktif di keanggotannya, Enny menuturkan, MK tetap tidak bisa mengintervensi MKMK. Ia menegaskan MKMK akan bekerja secara independen.

"Jadi kami juga tidak bisa mengintervensi MKMK yang akan terbentuk nantinya. Biarkanlah mereka yang bekerja. Sekalipun nanti dikatakan di situ kok ada hakim aktif, tetapi itu perintah UU, saya juga akan bekerja independen sebagaimana keyakinan saya untuk itu. Oleh karena itu, biarkanlah mereka bekerja secara independen," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyebutkan pihaknya telah mengadakan rapat permusyawaratan hakim (RPH) membahas terkait masalah ini. Ia menyatakan MKMK akan mulai bekerja pada 1 Februari mendatang.

"Dalam waktu dekat kalau untuk MKMK jelas insyaallah 1 Februari sudah mulai bekerja dalam waktu 30 hari paling lambat sudah selesai melaksanakan tugas atau amanat yang dibebankan kepada beliau-beliau," ucapnya.

MKMK itu terdiri atas Enny, mantan hakim MK Dewa Gede Palguna, dan ahli pidana UGM Sudjito. Pada kesempatan yang sama, Ketua MK Anwar Usman menyebutkan pihaknya telah mengadakan rapat permusyawaratan hakim (RPH) membahas terkait masalah ini.

Enny selain sebagai hakim konstitusi juga Guru Besar UGM Yogyakarta. Perempuan kelahiran Pangkalpinang, 27 Juni 1962 itu menyelesaikan S1 dari FH UGM dan langsung mengajar di kampusnya. Kiprah di luar kampus seperti ikut terlibat dalam

pembentukan Parliament Watch pada 1998. Enny juga pernah menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham selama 4 tahun sebelum dipilih Presiden Jokowi jadi hakim konstitusi pada 2018. Enny mengaku siap dengan resiko menjadi hakim yaitu dunia sosialnya menjadi terbatas.

"Apalagi jika di sekitar kita banyak orang yang mengajukan perkara ke MK, maka akan semakin sempit ruang geraknya. Apalagi seorang hakim konstitusi tidak boleh berinteraksi dengan orang yang berperkara. Semakin banyak orang sekelilingnya yang berperkara di MK berarti mempersempit ruang hakim untuk banyak berhubungan. Jadi, hakim bekerja dalam ruang yang sunyi di tengah keramaian," kata Enny. Enny menjadi hakim MK sejak 2018 setelah dipilih Presiden Jokowi. Enny menggantikan hakim MK Maria Farida yang juga hakim MK mewakili keterwakilan perempuan.

Sedangkan I Dewa Gede Palguna merupakan hakim konstitusi angkatan pertama MK, 2003-2008, dari unsur DPR. Tujuh tahun setelahnya, Palguna kembali menjadi hakim MK 2015-2020 atas pilihan Presiden Joko Widodo. Setelah purnatugas menjadi hakim MK, Palguna kembali ke kampusnya, Universitas Udayana, mengajar hukum tata negara.

Enny dan Palguna sama-sama mencuri perhatian publik saat persidangan sengketa pilpres 2019. Apalagi, salah satu sidangnya digelar semalam suntuk.

Nama terakhir yaitu Sudjito. Prof Sudjito menamatkan jenjang Strata 1 Ilmu Hukum di UGM pada 1979, kemudian menyelesaikan Strata 2 juga di UGM pada 1997 dan mengambil gelar doktor di Universitas Diponegoro. Sebelum menjadi anggota MKMK, Sudjito juga anggota Dewan Etik MK.

Sebagaimana diketahui, kasus ini bermula dari Aswanto yang dicopot secara tiba-tiba oleh DPR pada akhir September 2022. DPR juga menunjuk Guntur Hamzah yang semula menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK untuk menggantikan Aswanto. Alasan DPR mencopot Aswanto mengagetkan.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto terang-terangan menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan keputusan politik Menurutnya, kinerja Aswanto mengecewakan karena kerap membatalkan produk undang-undang dari DPR. Padahal, Aswanto merupakan hakim konstitusi yang dulunya terpilih dari usulan anggota legislatif. "Tentu mengecewakan dong. Ya gimana kalau produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia, dia wakilnya dari DPR. Kan gitu toh," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (30/9/2022).

Pencopotan Aswanto ini banjir kritik dari banyak kalangan, mulai dari mantan hakim MK, aktivis, hingga masyarakat sipil. Mereka menilai pencopotan Aswanto melanggar undang-undang. Presiden Joko Widodo pun diminta tak menerbitkan keputusan presiden (keppres) pemberhentian Aswanto.

Namun, seolah tak digubris, Jokowi pada akhirnya menerbitkan Keppres Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aswanto pun resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Guntur Hamzah yang dilantik presiden pada Rabu (23/11/2022), beberapa jam sebelum putusan MK soal uji materi UU Mahkamah Konstitusi dibacakan. (wid.kum.tri.ist.rls|dya)

## PENGHASILAN TINGGI HAKIM KONSTITUSI

HAK YANG DIDAPAT HAKIM KONSTITUSI (PP NO. 55 TAHUN 2014)



Gaji Pokok



Tunjangan Jabatan



Penghasilan Pensiun



Tunjangan Lainnya



Tunjangan Kesehatan



Rumah Pribadi



Kedudukan Protokol



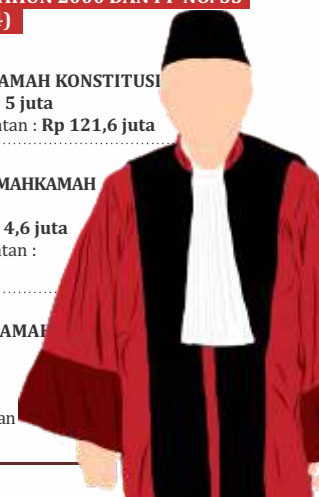
Fasilitas Transportasi

BESARAN GAJI BERDASARKAN JABATAN (PP NO. 75 TAHUN 2000 DAN PP NO. 55 TAHUN 2014)

**GAJI POKOK KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
Gaji Pokok : Rp 5 juta  
Tunjangan Jabatan : Rp 121,6 juta

**GAJI POKOK WAKIL KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
Gaji Pokok : Rp 4,6 juta  
Tunjangan Jabatan : Rp 82,45 juta

**GAJI POKOK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI**  
Gaji Pokok : Rp 4,2 juta  
Tunjangan Jabatan : Rp 72,85 juta



# Inflasi Januari Capai 5,28%, BPS: Harga Pangan Naik, Buntut Ketergantungan Impor



(Ilustrasi) Kenaikan harga pangan termasuk beras memicu inflasi bulan Januari 2023 ini. (Foto-dok)

**JAKARTA** - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono menyebut komoditas bahan pangan menjadi salah satu pendorong utama kenaikan inflasi Januari 2023. Kenaikan inflasi tersebut dipicu masih banyaknya bahan pangan yang didatangkan dari luar negeri atau harus impor.

"Terkait imported inflation ini karena sebagian bahan pangan kita masih tergantung suplai global," kata Margo di Gedung BPS, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2023).

Akibatnya harga pangan di Indonesia tergantung pada kondisi ekonomi global. Saat kondisi global sedang baik, rantai pasok, harga komoditas terkendali dan nilai tukar terkendali, maka kontribusinya minim. "Kalau semua terkendali, maka pengaruh ke inflasi bisa minim," kata dia.

Sebaliknya, jika salah satu komponen tersebut terganggu, maka bisa berdampak terhadap inflasi. Jika rantai pasok terganggu, nilai tukar mata uang tinggi, maka harga pangan akan naik. Bila dalam kondisi tersebut permintaan barang tinggi, maka akan langsung berimbas kepada harga pangan. "Impor bahan pangan yang tinggi ini bisa dorong inflasi harga pangan," kata dia.

Sebagai informasi, inflasi pada Januari 2023 sebesar 0,34 persen (mtm) dan 5,28 persen (yoy). Secara bulanan, kenaikan inflasi didorong komoditas beras (0,07 persen), cabai merah dan ikan segar masing-masing 0,04 persen, serta cabai rawit dan rokok kretek masing-masing 0,03 persen.

Sementara itu, penyumbang inflasi tahunan antara lain bensin (1,07 persen), bahan bakar rumah tangga

(0,24persen), beras (0,24 persen), tarif angkutan udara (0,19 persen) dan rokok kretek filter (0,1 persen).

### Menkeu Pamer RI Lebih Baik dari AS

Terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan di depan investor yang hadir di Mandiri Investment Forum (MIF) 2023 bahwa pengendalian inflasi di Indonesia lebih baik dari Amerika Serikat (AS). "Dalam menurunkan inflasi, Indonesia tidak mengambil tindakan seperti AS. Kami memiliki upaya bersama untuk menurunkan inflasi dan hal tersebut bekerja lebih baik di Indonesia," ungkapnya di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Dalam paparannya, Sri Mulyani membandingkan angka inflasi Indonesia pada Desember 2022 mencapai kisaran 5,5 persen, sementara AS berada di angka 6,5 persen.

Adapun, lanjutnya, hasil kolaborasi mulai dari pemerintah pusat hingga daerah dan lintas sektoral dijalankan dalam upaya menurunkan inflasi terutama terkait harga pangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi 2022 berada di angka 5,51 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). "Kami tidak menghabiskan banyak uang hingga triliunan dolar AS, tetapi harga stabil karena kolaborasi antar pemerintah, yaitu presiden,

walikota, hingga bupati," lanjutnya.

Sebelumnya, dalam upaya memulihkan Indonesia dari pandemi Covid-19, Sri Mulyani menyebutkan bahwa Presiden Jokowi menekankan target Indonesia dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, stunting, serta stabilisasi harga hingga penurunan inflasi. Menurut Sri Mulyani, langkah Indonesia tersebut menjadi contoh bagi negara lain bahwa tidak perlu banyak alat fiskal dan moneter yang digunakan untuk menekan inflasi. "Ini mungkin menunjukkan kepada dunia, tentang bagaimana menstabilkan harga tanpa menggunakan terlalu banyak alat fiskal dan moneter karena sumber inflasi adalah dari sisi suplai," tambahnya.

Meski mengklaim bahwa inflasi telah stabil, Sri Mulyani menilai Indonesia masih perlu bekerja untuk menjaga dan memantau semua aspek inflasi secara detail. Dalam menghadapi pelemahan ekonomi global yang ada, Menkeu yakin hal tersebut berlangsung hanya sampai paruh pertama 2023. Tekanan yang berasal dari respon kebijakan, pengetatan moneter, dan naiknya suku bunga oleh otoritas moneter akan melambat.

Hal tersebut mendukung harapan baru bahwa 2023, setidaknya pada paruh kedua, Indonesia akan melihat kombinasi yang positif dengan penurunan inflasi, harga stabil dan dan memperkuat pemulihan ekonomi. Pasalnya, BPS mencatat untuk inflasi pada Januari 2023 masih dipengaruhi oleh kenaikan harga makanan minuman, khususnya beras, dan tembakau.

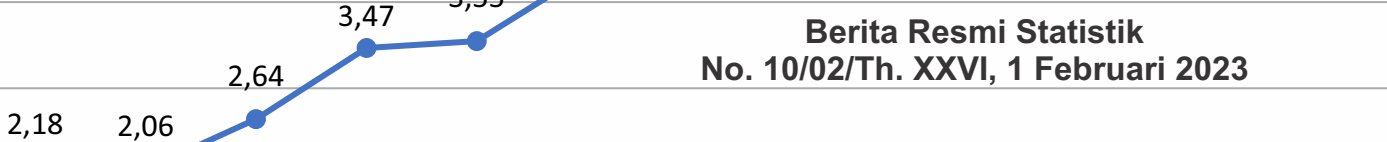
Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman memperkirakan inflasi akan tetap berada di atas kisaran target Bank Indonesia sebesar 2 - 4 persen setidaknya hingga paruh pertama 2023. "Inflasi akan berada di kisaran 4 - 6 persen [yoy] pada paruh pertama sebelum menurun menuju kisaran target pada paruh kedua," ungkapnya dalam keterangan resmi, Rabu (1/2/2023).

Salah satu hal yang perlu diwaspadai, lanjutnya, adalah kenaikan harga pangan domestik, terutama beras, di tengah penurunan harga energi dan bahan bakar global. "Secara keseluruhan, kami memperkirakan inflasi sekitar 3,60% pada akhir 2023, mendukung perkiraan kami untuk BI-7DRRR tetap datar di 5,75 persen di sisa 2023," ujarnya. (wid.tri.rls/dya)

## PERKEMBANGAN

## INDEKS HARGA KONSUMEN

## JANUARI 2023



Berita Resmi Statistik  
No. 10/02/Th. XXVI, 1 Februari 2023

JANUARI 2023  
**INFLASI 0,34%**

TAHUN KALENDER  
**INFLASI 0,34%**

TAHUN KE TAHUN  
**INFLASI 5,28%**